

Peningkatan Efektivitas Belanja Menuju SDM Unggul Indonesia Maju

Rudi Purwono

Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga

Picture source: <https://www.britannica.com/place/Jakarta>



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

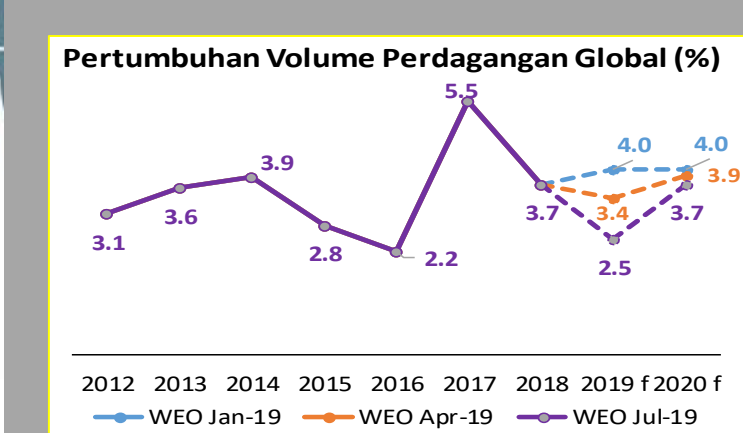
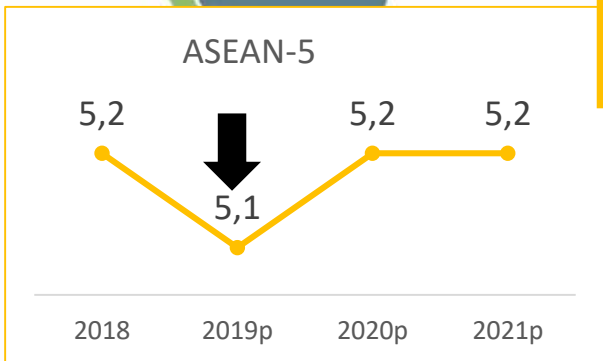
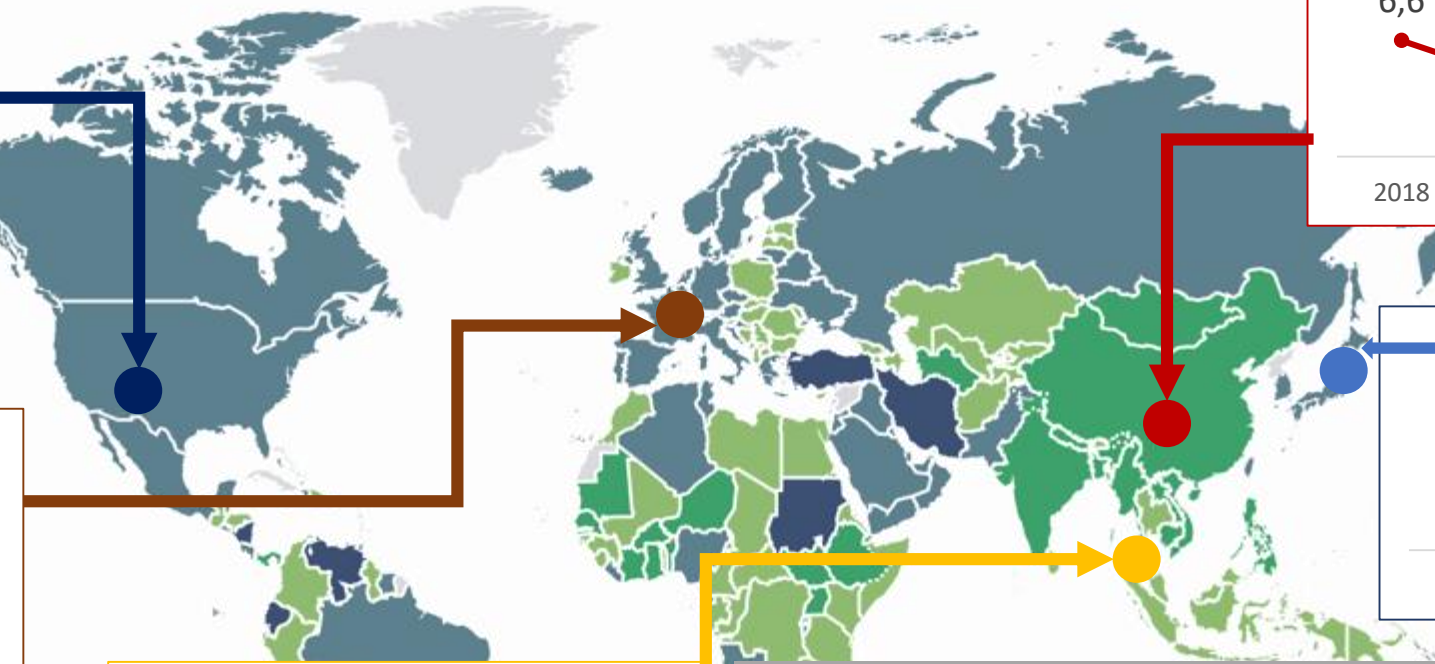
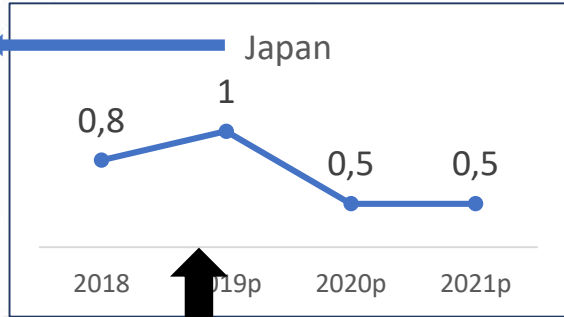
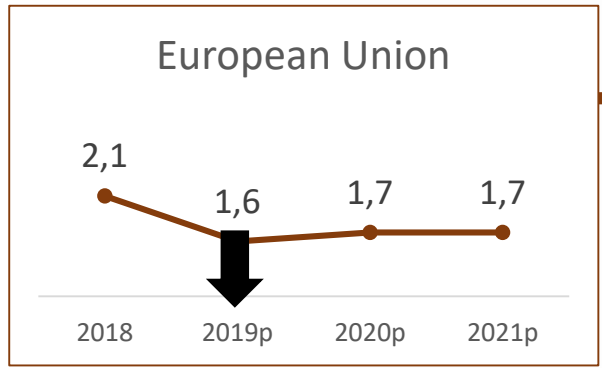
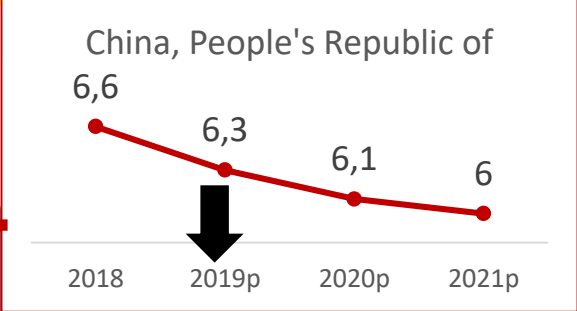
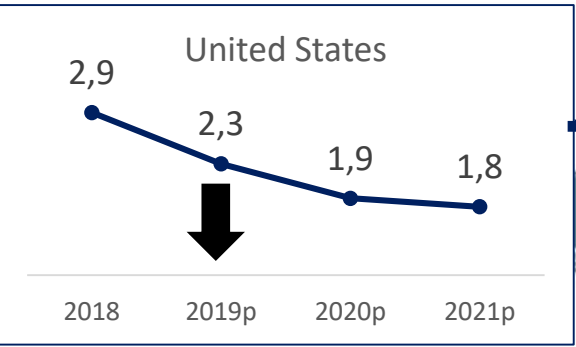


UNIVERSITAS
AIRLANGGA

FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI

Seluruh negara/ kawasan diperkirakan mengalami perlambatan, kecuali Jepang



Perlambatan pertumbuhan disebabkan perlambatan perdagangan

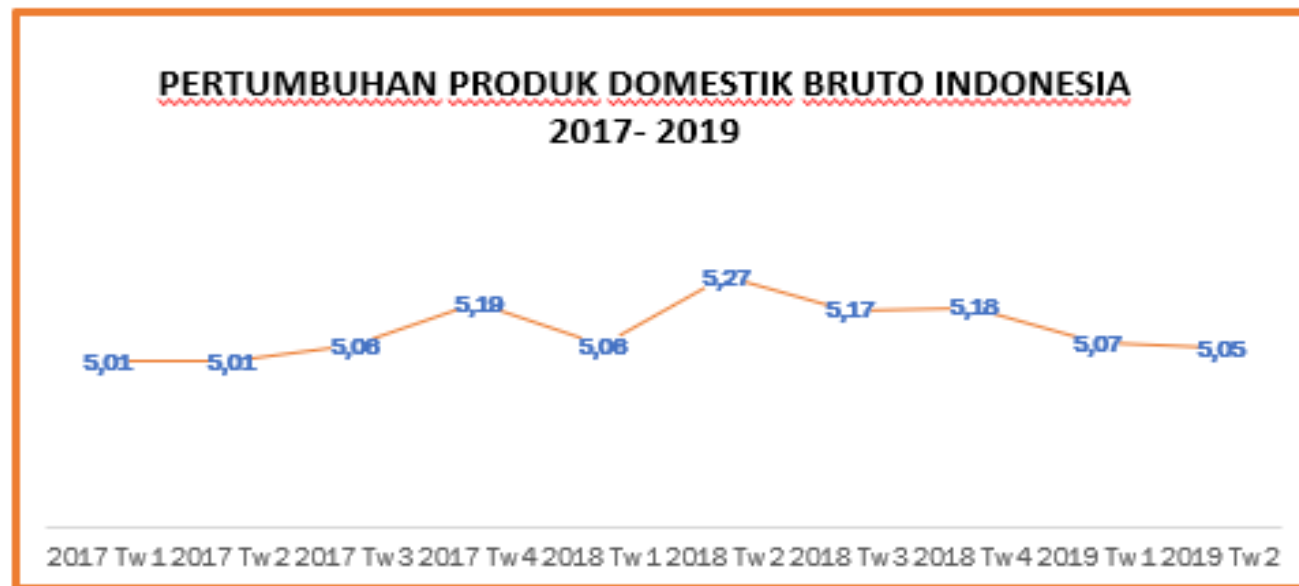
Sumber: IMF, WEO April 2019

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Proyeksi 2020?

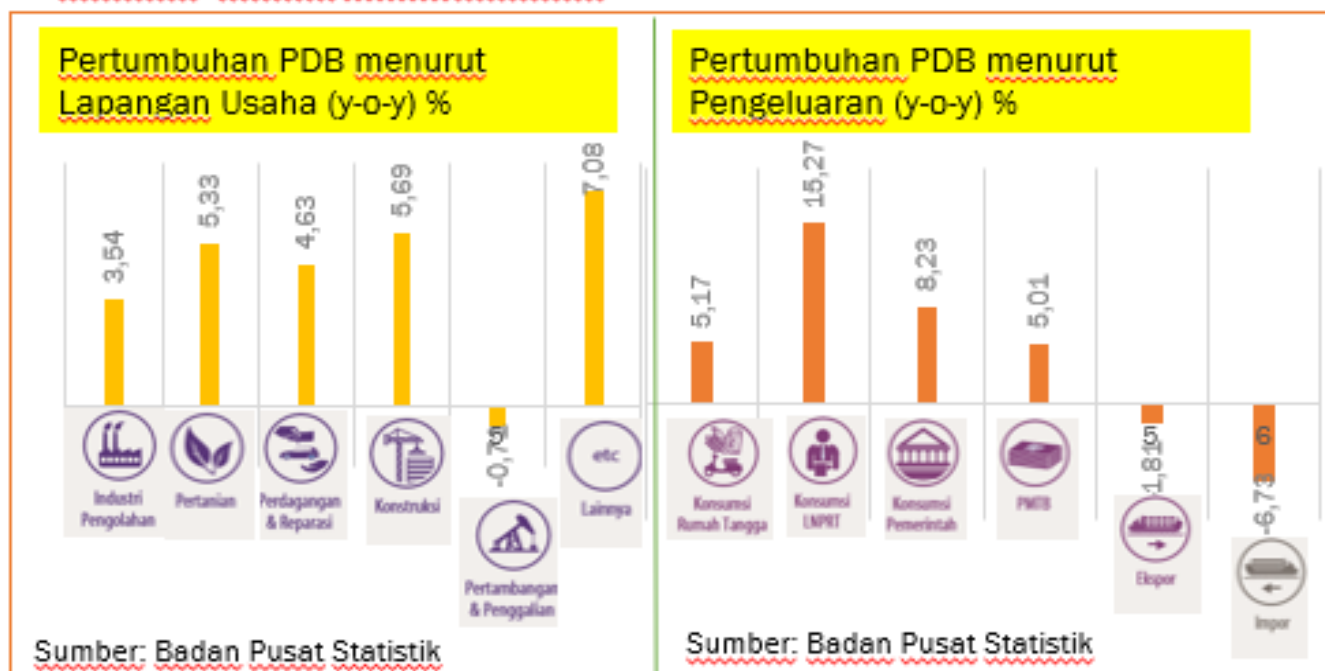
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

	2019	2020
IMF (Jul 19)	5,2	5,2
World Bank (Jun 19)	5,1	5,2
ADB (Jul 19)	5,2	5,3

Sumber: IMF, World Bank, ADB



Sumber: Badan Pusat Statistik



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumber: Badan Pusat Statistik

Negara-Negara G-20

Negara mana yang Masuk “MIT”



Amerika Serikat



Uni Eropa



China



Jepang



Jerman



Inggris



Prancis



India



Italia



Kanada



Rusia



Korea Selatan



Australia



Meksiko



Arab Saudi



Afrika Selatan



Argentina



Turki



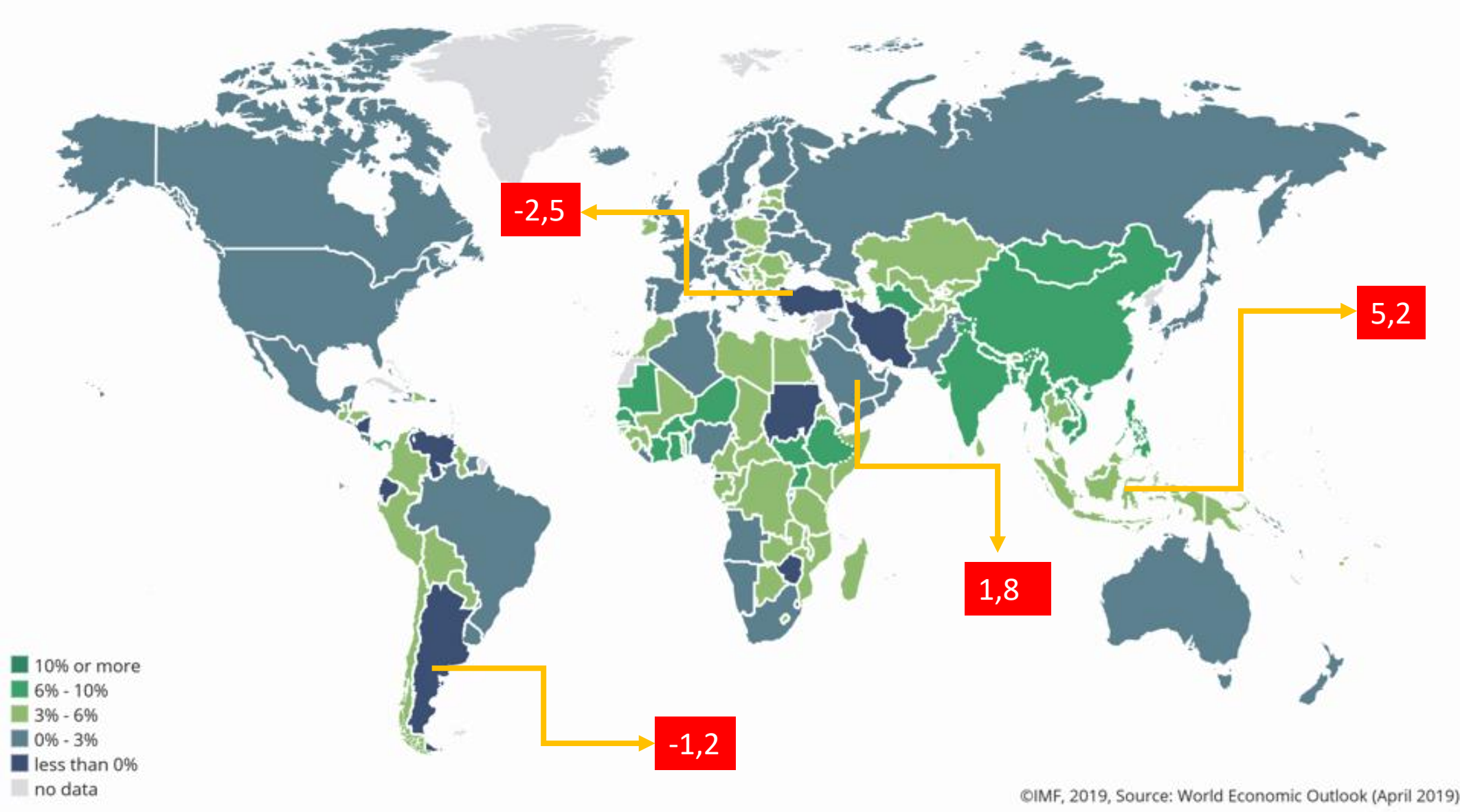
Brazil



Indonesia

Negara G-20 yang terjebak kedalam
“*Middle Income Trap*” termasuk Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi negara G-20 yang masuk “Middle Income Trap”, 2019*



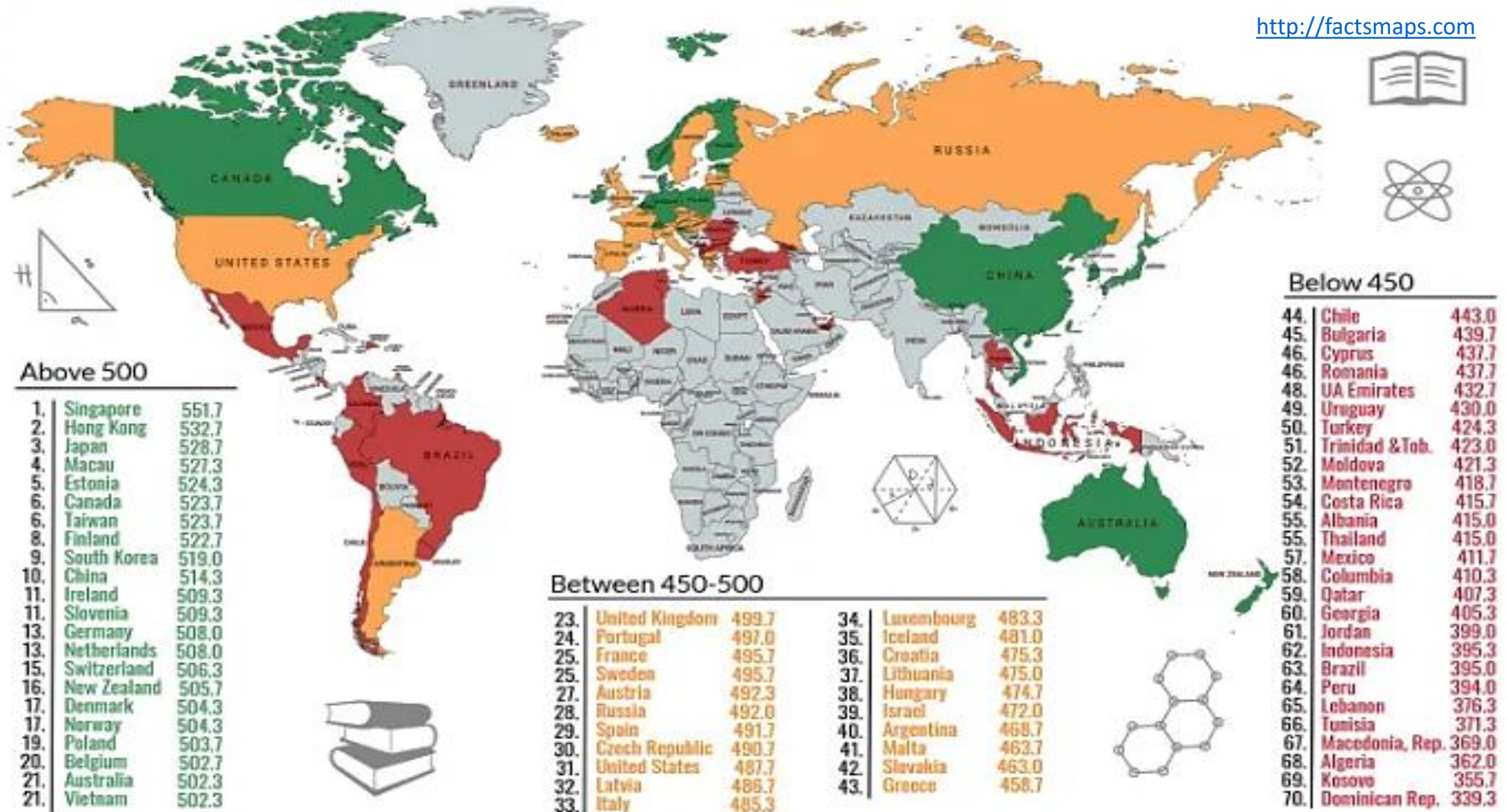
Program for International Student Assessment (PISA)

PISA merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Program ini diadakan setiap tiga tahun sekali. Siswa berusia 15 untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains.

TOP 10 PISA 2015

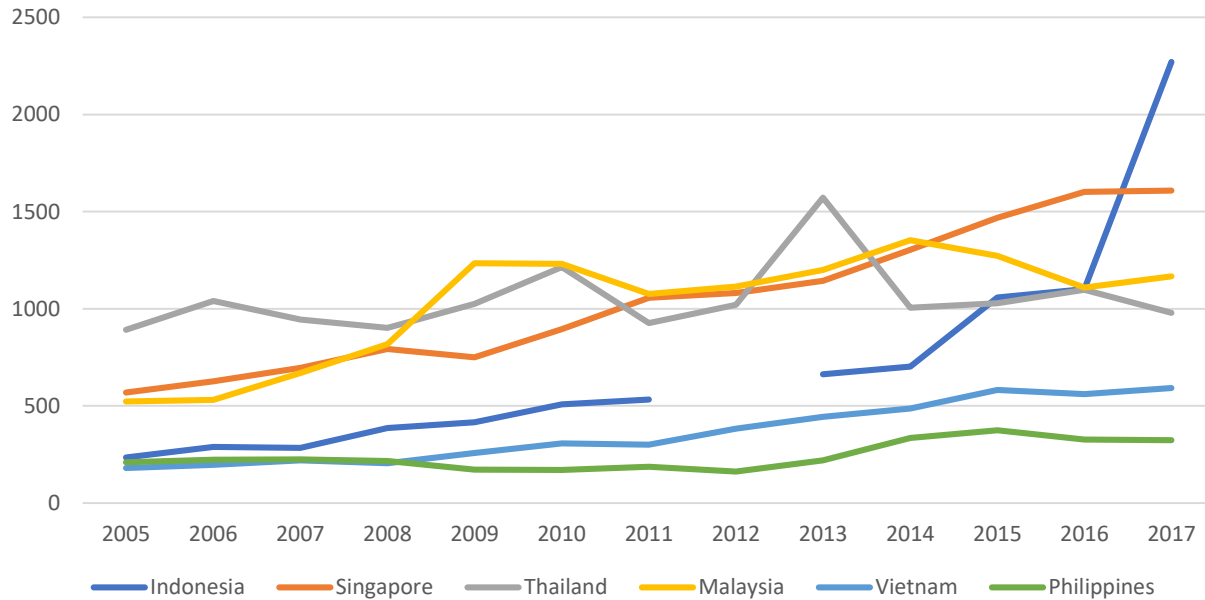
1. Singapore
2. Japan
3. Estonia
4. Chinese Taipei
5. Finland
6. Macao (China)
7. Canada
8. Vietnam
9. Hongkong
10. BSJG (China)

Sumber: OECD



Perkembangan Hak Paten 6 Negara ASEAN 2005-2017

(Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina)



Sumber: World Intellectual Property Organization (WIPO)

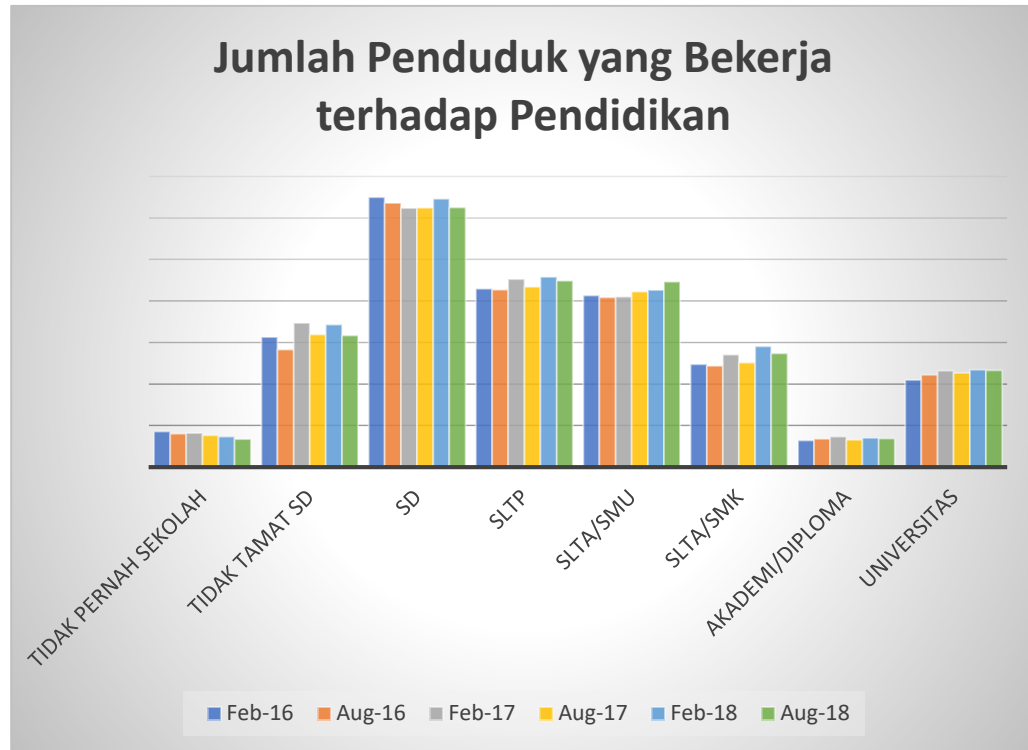
Indonesia memiliki jumlah hak paten **tertinggi** dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain (Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2017).

Jumlah Hak Paten 2017

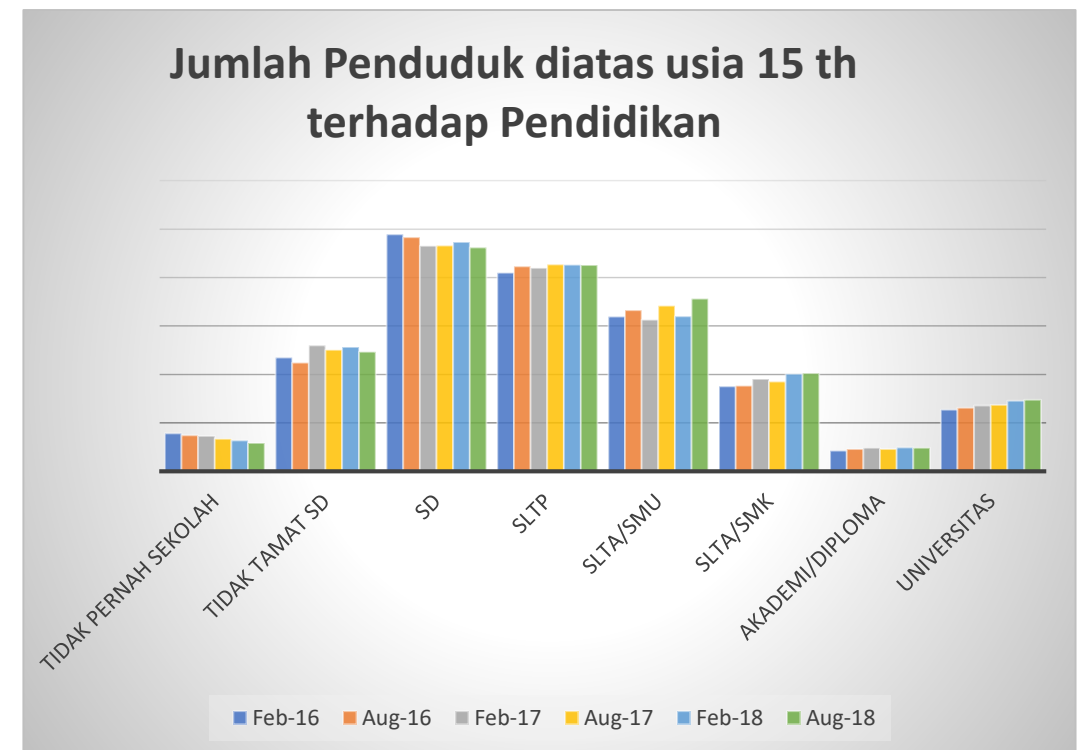
No	Country Name	2016	2017
1	Indonesia	1101	2271
2	Singapore	1601	1609
3	Thailand	1098	979
4	Malaysia	1109	1166
5	Vietnam	560	592
6	Philippines	327	323

Indonesia memiliki **2271** hak paten pada tahun 2017, World Intellectual Property Organization (WIPO)

Struktur Penduduk dan Pekerja menurut Pendidikan di Indonesia



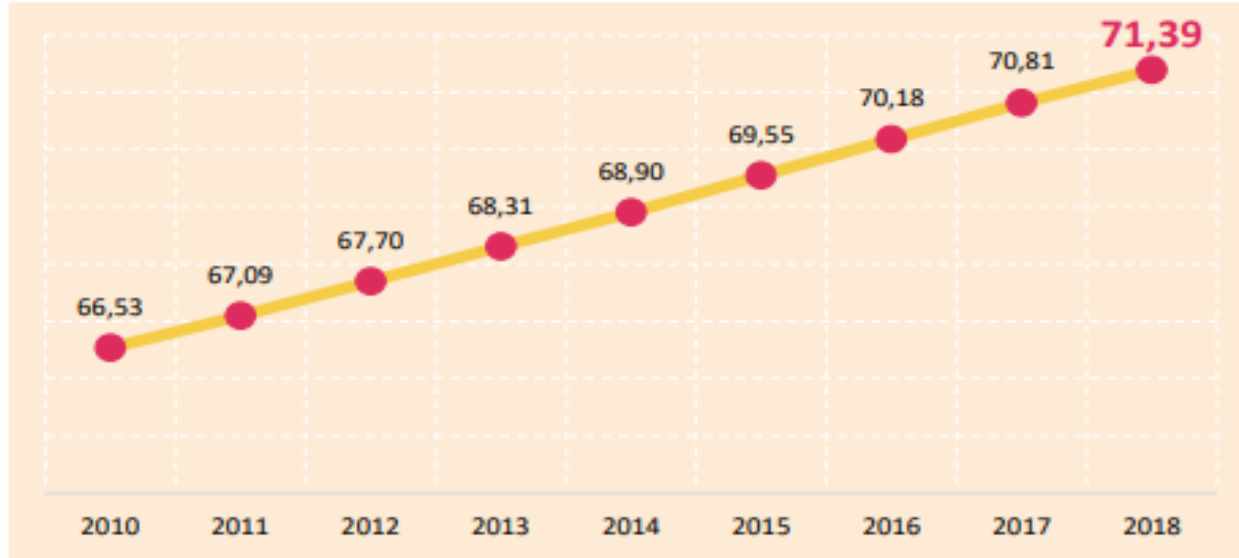
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019

Struktur jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang bekerja cenderung memiliki pola yang sama. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 40,51% (BPS, 2019) Kementerian Ketenagakerjaan tengah berupaya meningkatkan daya saing pekerja di Tanah Air melalui program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemagangan berbasis kompetensi di perusahaan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2010-2018



Komponen IPM Indonesia, 2018



Indeks Pembangunan Manusia **71,39**



Harapan Lama Sekolah **12,91 th**
Rata-Rata Lama Sekolah **8,17 th**



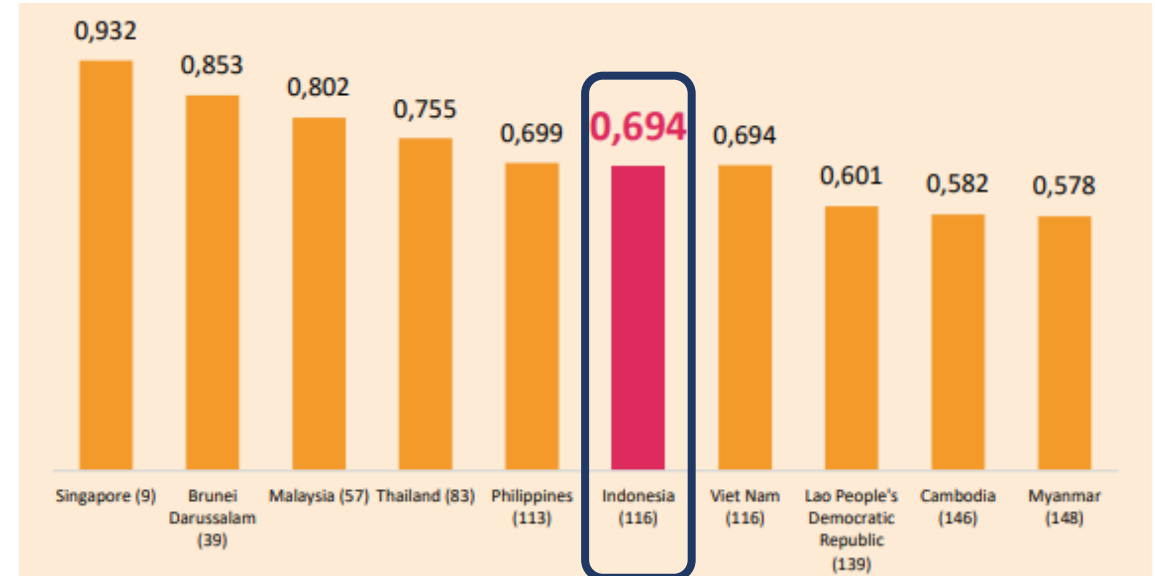
Umur Harapan Hidup **71,20 th**



Pengeluaran Per Kapita
Rp 11.059.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM di Negara ASEAN, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

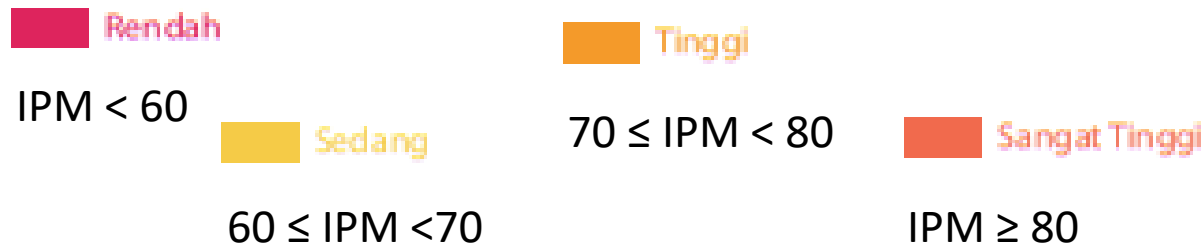
IPM Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Philipina namun masih diatas Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan gambar :



IPM dan Komponennya Provinsi Jawa dan Nasional

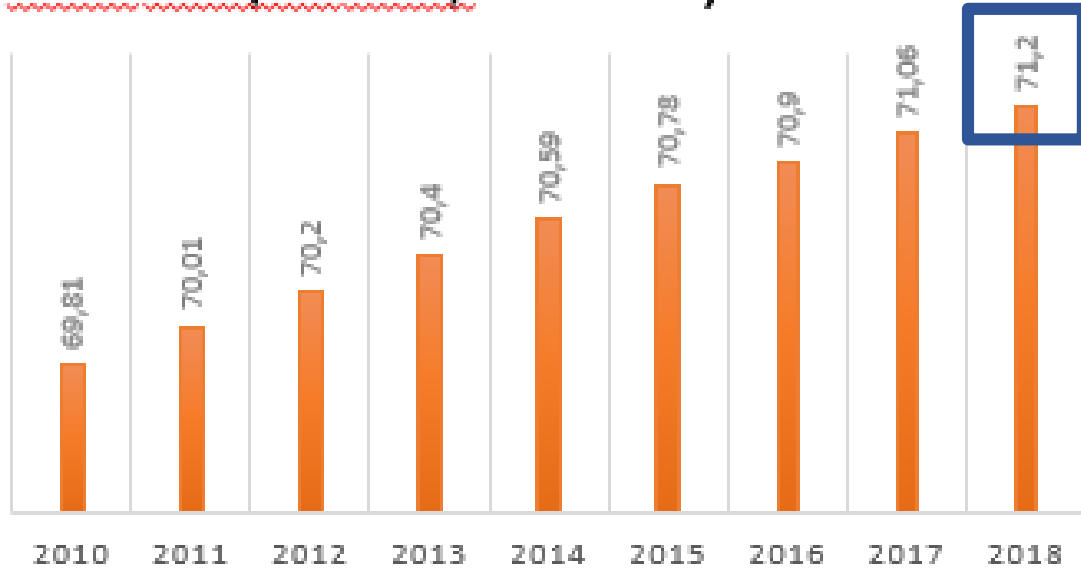
PROVINSI	Th	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp)	IPM	Kategori
DKI	2017	72,55	12,86	11,02	17.707	80,06	S.Tinggi
	2018	72,67	12,95	11,05	18.128	80,47	S.Tinggi
Jawa Barat	2017	72,47	12,42	8,14	10.285	70,69	Tinggi
	2018	72,66	12,45	8,15	10.790	71,30	Tinggi
Banten	2017	69,49	12,78	8,53	11.659	71,42	Tinggi
	2018	69,64	12,85	8,62	11.994	71,95	Tinggi
DIY	2017	74,74	15,42	9,19	13.521	78,89	Tinggi
	2018	74,82	15,56	9,32	13.946	79,53	Tinggi
Jawa Tengah	2017	74,08	12,57	7,27	10.377	70,52	Tinggi
	2018	74,18	12,63	7,35	10.777	71,12	Tinggi
Jawa Timur	2017	70,80	13,09	7,34	10.973	70,27	Tinggi
	2018	70,97	13,10	7,39	11.380	70,77	Tinggi
NASIONAL	2017	71,06	12,85	8,10	10.664	70,81	Tinggi
	2018	71,20	12,91	8,17	11.059	71,39	Tinggi

Keterangan :

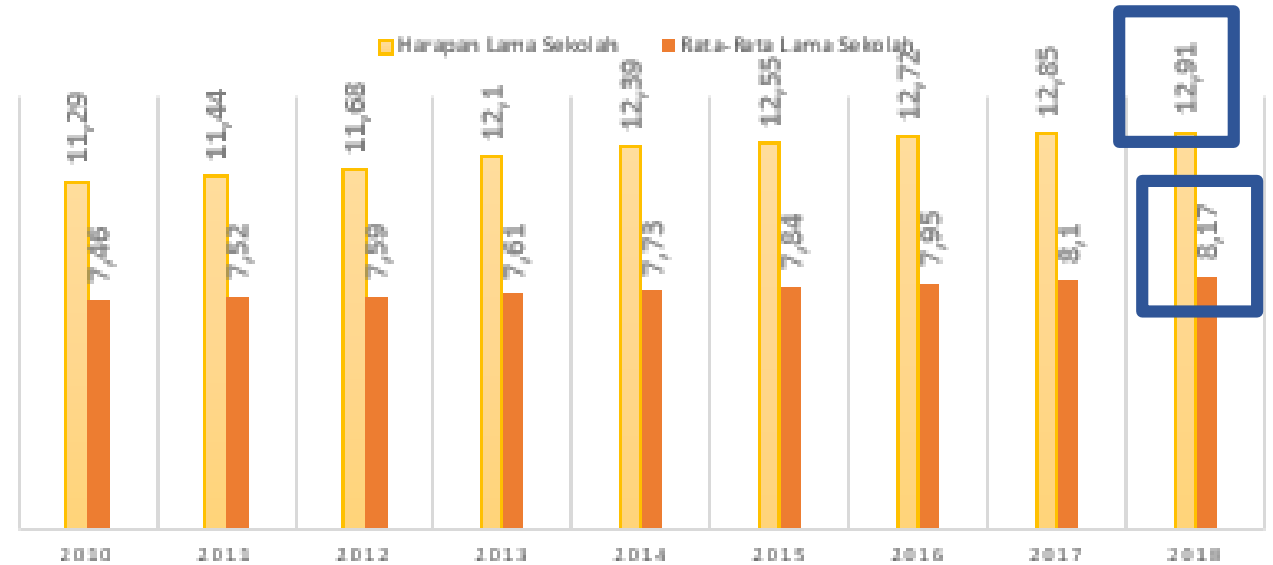
SANGAT TINGGI	IPM ≥ 80	AHH	: Angka Harapan Hidup
TINGGI	70 ≤ IPM < 80	HLS	: Harapan Lama Sekolah
SEDANG	60 ≤ IPM < 70	RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RENDAH	IPM < 60	Pengeluaran	: Ribu Rupiah / tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dinamis Agustus 2019

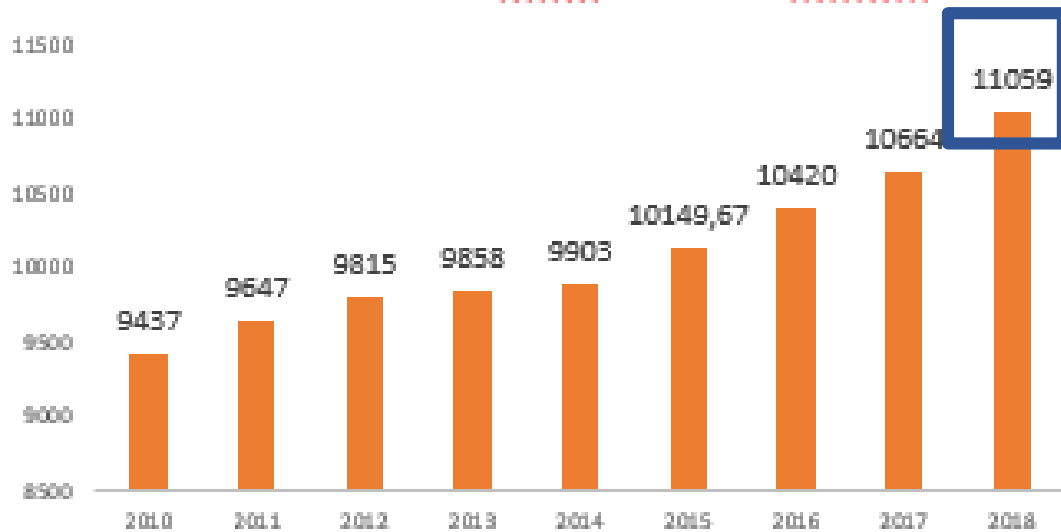
Umur Harapan Hidup Indonesia, 2010-2018



Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, 2010-2018



Pengeluaran per Kpaita yang Disesuaikan Indonesia, 2010- 2018 (Ribu Rupiah/Tahun)

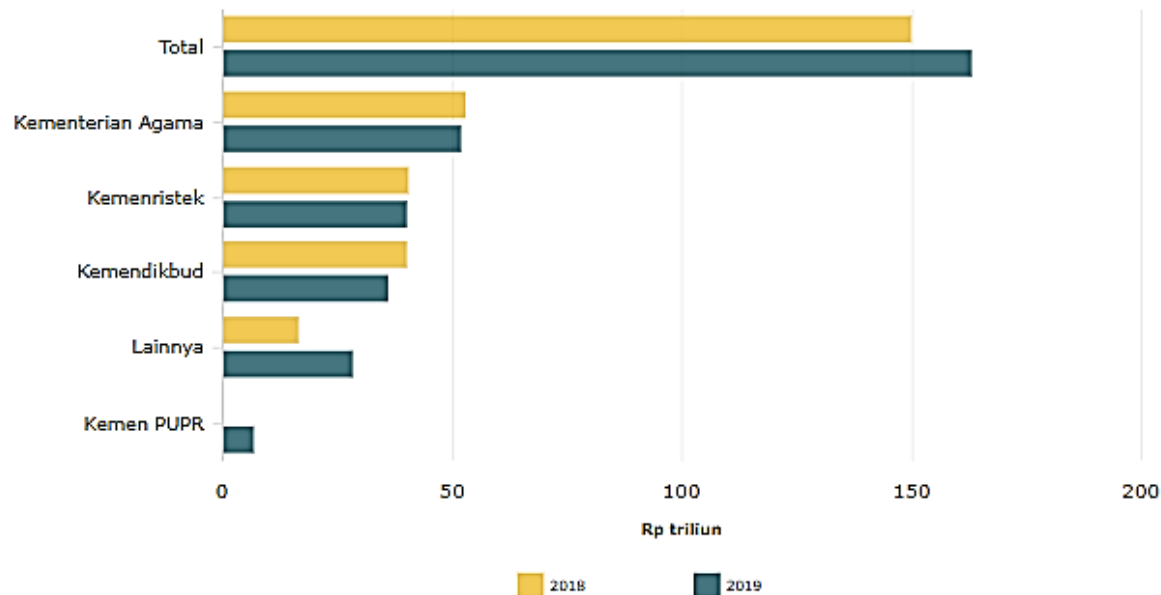


Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator IPM di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal tersebut tentunya membuktikan bahwa keadaan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik setiap tahunnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018-2019

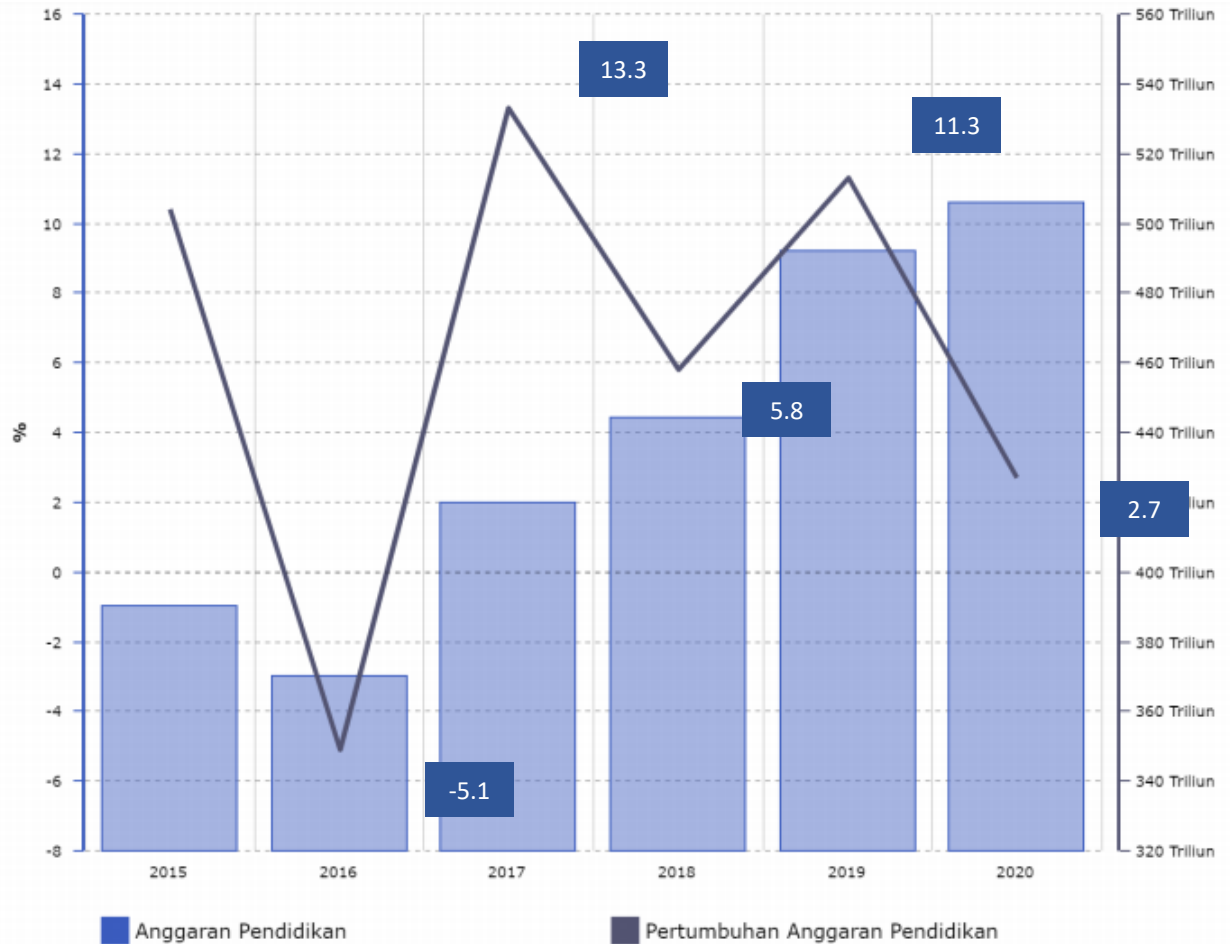


Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Anggaran pendidikan 2019 yang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turun 10,2% menjadi Rp 36 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan 22,07% [anggaran pendidikan](#) melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp 163,1 triliun atau setara 7,31% dari total anggaran pendidikan tahun ini Rp 492,5 triliun. Anggaran melalui belanja pemerintah pusat ini termasuk tambahan untuk Polri, TNI, BPPT sebesar Rp 1,25 triliun.

Sementara anggaran pendidikan terbesar yang melalui belanja pemerintah pusat adalah untuk Kementerian Agama, yakni mencapai Rp 51,9 triliun. Sedangkan terbesar kedua melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 40,2 triliun. Adapun anggaran pendidikan tahun ini yang melalui transfer mencapai Rp 308,4 triliun meningkat 10% dari tahun sebelumnya dan yang melalui pembiayaan Rp 21 triliun naik 40% dari sebelumnya.

Anggaran Pendidikan Indonesia 2015-2019



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Anggaran 2020 mencapai
Rp 505,8 triliun
20% dari jumlah total
belanja negara

Pemerintah berharap anggaran pendidikan ini dapat membangun kemampuan dasar anak-anak Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan dasar. Terutama dalam kemampuan literasi, matematika, dan sains. Hal tersebut dikarenakan kemampuan dasar dapat menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah juga memberikan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.



Menjaga
Belanja Berkualitas

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kata kuncinya adalah **produktivitas** dan **inovasi**

Dalam hal pendapatan dan belanja negara (daerah),

Pemerintah telah memiliki begitu banyak instrument untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Sektor usaha didorong produktivitasnya, dan Pemerintah harus inovatif dalam pengelolaan keuangan negara (daerah)



Pendapatan

Terdapat 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diterbitkan Pemerintah, yang dikelompokkan sbb:

1. Insentif Fiskal

2. Akses Pembiayaan

3. Perizinan

4. Kebijakan Sektor Riil



Terdapat TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa)

DAU

DAK

Dana Desa

Belanja

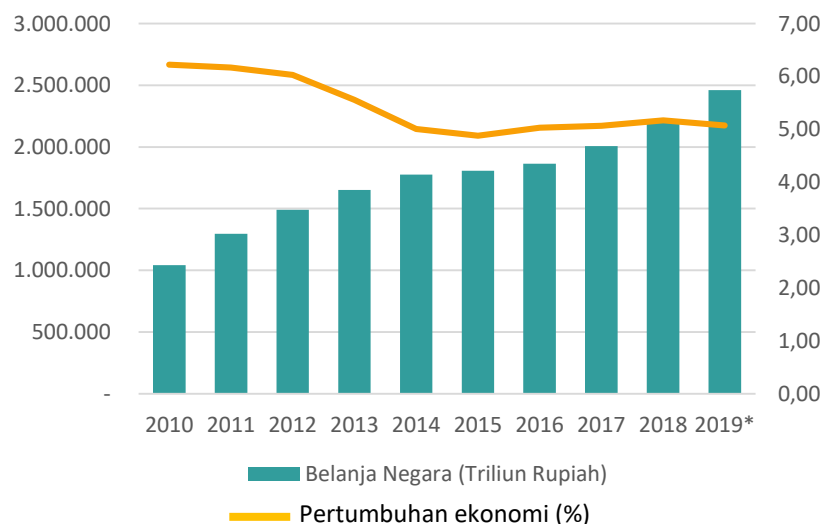


Bagaimana evaluasinya ?

Belanja Pemerintah harus Berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

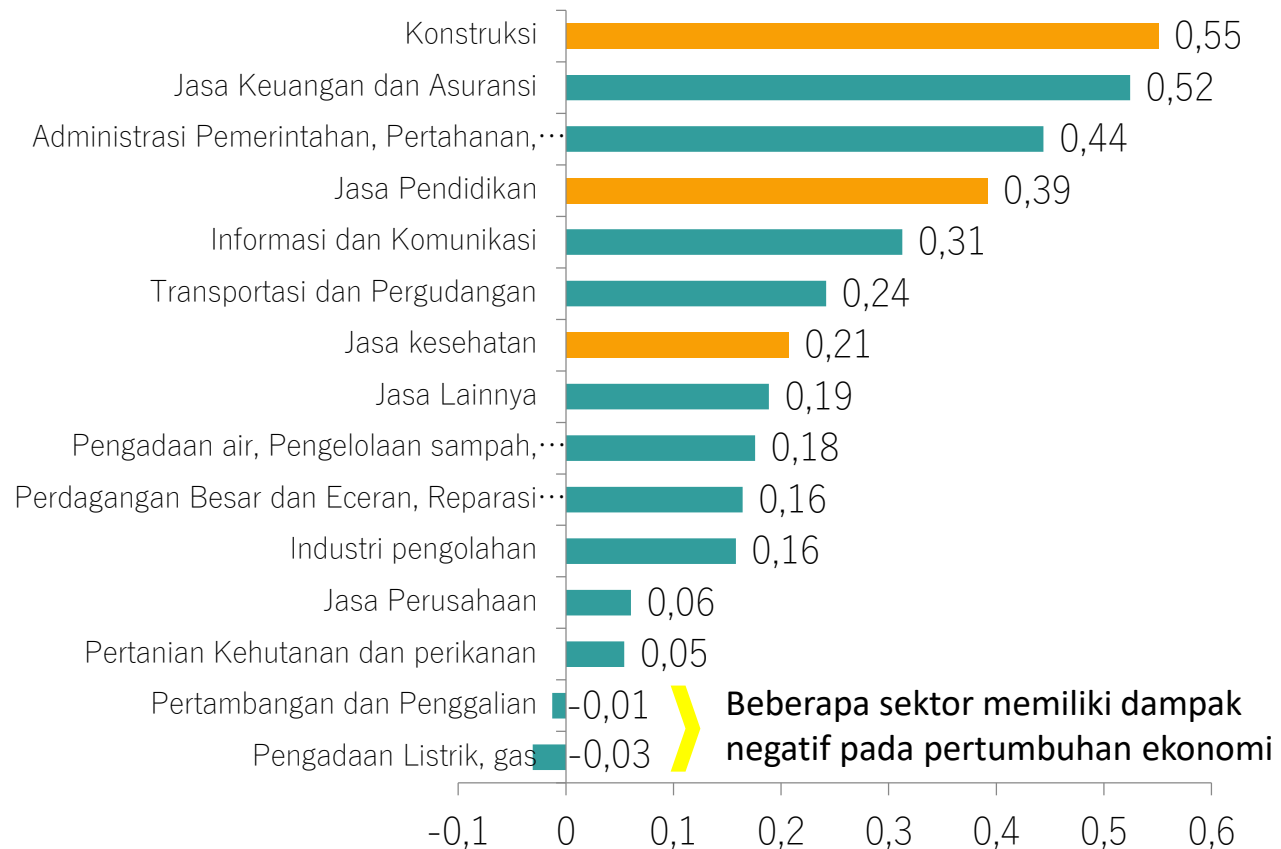
Menurut studi BAPPENAS, peningkatan belanja negara **belum** dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Perkembangan Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi 2010-2019



Sumber: BAPPENAS

Elastisitas Belanja K/L Per Sektor (2013-2017)



Beberapa sektor memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi

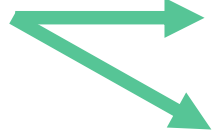
Peningkatan belanja K/L yang memiliki dampak terbesar pada pertumbuhan ekonomi adalah pada sektor Konstruksi dan Keuangan.

Dampak terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi, 2016-2017

Belanja Modal 0,03%

Belanja Barang 0,08%

Belanja Pegawai 0,01%



Dampak terhadap Daerah/Masyarakat

1%

Peningkatan Belanja
Alsintan & Input Produksi
(Kementan)



0,33%
Peningkatan Subsektor
Pertanian, Peternakan,
Perburuan, dan Jasa
Pertanian di daerah

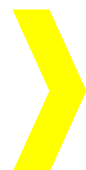
1%

Belanja Pengadaan
Kapal (KKP)

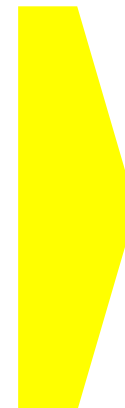


0,13%
Peningkatan Subsektor
Perikanan di daerah
0,07 poin
Penurunan ketimpangan
intradaerah

1% peningkatan TKDD



meningkatkan 0,016% pertumbuhan ekonomi
menurunkan 0,3% jumlah orang miskin
menurunkan 0,012 poin ketimpangan daerah



Artinya,

Komponen belanja
yang fokus memiliki
elastisitas yang besar
pada pertumbuhan
ekonomi,
pengurangan
kemiskinan dan
ketimpangan daerah.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pertumbuhan (Binding Constraints Of Growth)

Belanja Pemerintah diharapkan bersifat **targeted**, sesuai dengan apa outcome yang ingin dicapai.

Sisi Permintaan

Sisi Produksi

Aktivitas ekonomi tidak lagi menguntungkan

Ekonomi Biaya Tinggi

Kondisi Geografis

Infrastruktur penunjang yang kurang memadai

Rendahnya Kemampuan Pembiayaan

Tingginya Bunga

Rendahnya Kemampuan SDM

Rendahnya Kredit Usaha

Kesulitan Bahan Baku

Kurang Tersedianya Instrumen Keuangan

Baik belanja pusat maupun di daerah diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan.



TERIMAKASIH